

Ini Alasan Wapres Ma'ruf Amin Bungkam Bahas Perpres Investasi Miras



Realitarakyat.com – Wakil Presiden Ma'ruf Amin nihil bicara kepada publik saat terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya memuat izin investasi miras yang menuai polemik di masyarakat.

Menurut jubiir Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan alasan Wapres bungkam lantaran merasa tidak ada gunanya membahas perpres ini.

"Tapi memang sengaja kiai Ma'ruf enggak mau bicara dengan siapapun. Dengan pers juga enggak mau bicara, karena enggak ada gunanya berbicara di saat seperti ini," kata Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Meski demikian, Masduki menegaskan bahwa Ma'ruf sudah melakukan sejumlah langkah agar aturan tersebut dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan Ma'ruf sudah mengusulkan dalam rapat terbatas pada Minggu (28/2) lalu dengan para menteri agar aturan tersebut tak dilanjutkan.

Ma'ruf, kata dia, juga sudah menghubungi beberapa menteri terkait agar usul pencabutan aturan bisa sampai ke Presiden Jokowi.

"Dan tadi sebelum mengumumkan (pencabutan) juga ada pembicaraan 4 mata antara presiden dan wapres membahas masalah itu," kata Masduki.

Masduki mengklaim Wapres Ma'ruf Amin awalnya tak mengetahui ada aturan terkait izin investasi miras dalam Perpres lantaran ketentuan itu muncul di lampiran Perpres.

Ia menyatakan bahwa Wapres Ma'ruf Amin jadi tersudut akibat aturan tersebut. Sebab, selain menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf juga merupakan ulama yang dihormati masyarakat Indonesia.

"Kan kiai Ma'ruf menjadi Wapres sebagai wakil kepala pemerintahan di satu pihak. Tapi di sisi lain dia mantan Rais Aam PBNU, mantan Ketum MUI. Sehingga bagaimana pemerintahannya kemudian mengeluarkan proses izin sebenarnya sesuatu yang dilarang di Alquran secara langsung. Kiai Ma'ruf sangat terjepit dalam kondisi ini," ungkap dia.

Sebelumnya, Jokowi sudah resmi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Jokowi

membatalkan Perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat lainnya.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ucap Jokowi dalam pernyataannya, Selasa (2/3).[prs]